

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA** (Studi Kasus Putusan No.39/Pid.B/2013/PN.Mks)



**OLEH :**

**FEBRIANSYAH**

**B 111 09 853**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2015**

**Halaman Judul**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.B/2013/PN.Mks)**

**OLEH :**

**FEBRIANSYAH**

**B 111 09 853**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi**

**Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSA**

**R 2015**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan No.39/PID.B/2013/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**FEBRIANSYAH**

**B 111 09 853**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana program kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

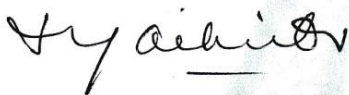
Pada 26 Januari 2015

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H**  
**NIP. 195311241979121001**



**Hj. Nur Azisa, S.H., M.H**  
**NIP. 196710101992022002**

**A.n Dekan**  
**Wakil Dekan I,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 196106071986011003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Febriansyah

Nomor Pokok : B 111 09 853

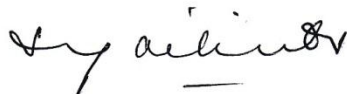
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan  
Berencana (Studi Kasus Putusan No.39/Pid.B/  
2013/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai  
akhir ujian program studi.

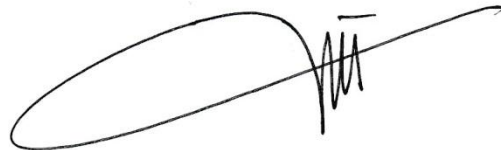
Makassar, 8 Januari 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
NIP. 195311241979121001



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Febriansyah

Nomor Pokok : B 111 09 853

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan


Berencana (Studi Kasus Putusan No.39/Pid.B/

-2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir ujian program studi.

Makassar, Januari 2015

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003



## ABSTRAK

Febriansyah (B11109853) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana pembunuhan Berencana” (Studi Kasus Putusan Nomor : 39/PID.B/2013/PN.Makassar). Dibimbing oleh Bapak M. Syukri Akub selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa.

Penelitian dilaksanakan di kota Makassar, yaitu Pengadilan Negeri Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan No. 39/PID.B/2013/PN.Makassar, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 4 (empat) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338, Lebih Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan Lebih-Lebih Subsidair Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling berkesesuaian. Menurut penulis, penerapan hukum materiil dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 39/PID.B/2013/PN.Makassar. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan tiga alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Tentang hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam tidak saja bagi keluarga korban tetapi juga bagi anak terdakwa sendiri yaitu saksi Musdalifah pacar korban dan tidak adanya perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa telah mengakui kesalahannya, terdakwa sopan di persidangan dan terakhir terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sekalipun penulis menyadari bahwa di dalamnya masih ada banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Dalam masa studi sampai hari ini, Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, terdapat banyak halangan dan rintangan yang telah penulis lalui. Banyak hal-hal yang penulis alami, perjuangan untuk menuntut ilmu memang berat, terkadang lelah hadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya penulis dapat melalui itu semua dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan kembali ke tanah kelahiran dengan gelar S.H dibelakang nama penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua Penulis yang tidak pernah lelah membanting tulang mencari nafkah demi membiayai studi Penulis. Apapun yang Penulis dapatkan hari ini tidak akan mampu membalas jasa-jasa mereka.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu membantu dalam program rencana studi.
5. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Staff Pengadilan Negeri Makassar yang membantu Penulis selama masa penelitian.
7. Kakak-kakak penulis yang tidak sempat Penulis Sebutkan satu persatu.
8. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas



Hasanuddin Yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu.

9. Keluarga Besar KKN Reguler Gel. 87 Posko Desa Tassipi,  
Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

10. Teman-teman, mulai dari, Tonton, Mandala, Mukhsin, Adam, Iccank,  
Alfian dan semua yang tak sempat penulis sebut.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis  
dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ke depannya Penulis bisa  
lebih baik lagi.

Wabbillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 17 Desember 2014

PENULIS

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Tindak Pidana .....	6
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana .....	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
B. Jenis- Jenis Pembunuhan .....	14
C. Pembunuhan Berencana.....	15
D. Pidana dan Pemidanaan .....	22
1. Arti Pidana dan Pemidanaan .....	22
2. Jenis-jenis Pidana .....	24
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	24
1. Dasar Peniadaan Pidana.....	24
2. Dasar Pemberatan Pidana Umum.....	26
3. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya pidana Umum.....	32

BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Dan Sumber Data .....	35
C. Jenis Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN .....	 37
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 39/PID.B/2013/PN.Mks) .....	  37
1. Posisi Kasus .....	37
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	39
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	45
4. Amar Putusan .....	46
5. Analisis Penulis .....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Perkara Pidana Nomor 39/Pid.B/2013/PN.Mks. ....	  51
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Perkara Pidana Nomor 39/Pid.B/2013/PN.Mks .....	   51
2. Amar Putusan .....	65
3. Analisis Penulis .....	67
 BAB V PENUTUP .....	 71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
 DAFTAR PUSTAKA .....	 74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat karena itu untuk mengatasinya dan melindungi masyarakat, maka pemerintah mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang diberitakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.

Hukum adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat urgen eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Untuk menjamin ketaatan

dan kepatuhan terhadap hukum adalah ditangan semua warga negara, namun dalam kenyatannya tidak semua warga negara atau masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melawan hukum seperti kejahatan pembunuhan.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan rencana sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Dalam hal ini pelaku telah memperhitungkan dan mempertimbangkan segala resiko atau baik buruknya perbuatan yang akan dilakukannya. Serta pelaku juga telah memikirkan akibat perbuatannya sekaligus cara-cara lain agar orang lain sulit mengetahui bahwa dialah pelakunya.

Pembunuhan berencana dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan seringkali terjadi di Indonesia. Adapun Motif dan latar belakang pelaku bervariasi, dari cemburu, dendam hingga sakit hati. Dalam kasus pembunuhan berencana yang terdapat dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2013/PN.MKS yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini terdapat motif dendam. Hal ini didasari oleh kekesalan pelaku terhadap perbuatan korban yang menghamili anak perempuannya tanpa adanya kesediaaan dan ketegasan dari korban untuk segera menikahi anak

perempuannya. Hal ini menimbulkan dendam dan sakit hati dari pelaku sehingga melakukan pembunuhan kepada korban. Dalam perkara tersebut diperlukan suatu penyelesaian hukum yang tepat, sehingga rasa keadilan dapat tercapai khususnya bagi korban dan keluarganya maupun bagiterdakwa.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Penegak hukum dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Di dalam sistem peradilan yang dilaksanakan dan dijalankan saat ini, masih belum dapat dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penanganan perkara dan penjatuhan hukuman yang kurang adil oleh hakim. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan juga membahas dakwaan serta tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis dengan dasar hukum yang digunakan. Sehingga dapat

diketahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana Nomor 39/Pid.B/2013/PN.Makassar.

Ini pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 39/PID.B/2013/PN.Makassar).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana nomor 39/PID.B/2013/PN.Makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana nomor 39/PID.B/2013/PN.Makassar?



### **C. Tujuan Penulisan**

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara pidana nomor 39/PID.B/2013/PN.Makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana nomor 39/PID.B/2013/PN.Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana .
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah misalnya tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya

R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana.

- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana, yang ditulis oleh M.H. Tirtaadmijaja.
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana.
- 6) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya diikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Pengertian tindak pidana menurut Simons (Erdianto Effendi: 2011: 97) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Pompe (Erdianto Effendi: 2011: 97), tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- c. Van Hamel (Erdianto Effendi: 2011: 98) merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- d. Menurut E. Uthrecht (Erdianto Effendi: 2011: 98), tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljatno (Erdianto Effendi: 2011: 98) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- f. Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi: 2011: 99) menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
- g. Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi: 2005: 75), menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana

perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

### **1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Moeljatno ( Adami Chazawi: 2005: 79), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian

ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna (Adami Chazawi: 2005: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers (Adami Chazawi: 2005: 81), unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi: 2005: 81), merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Sementara itu, EY. Kanter dan SR. Sianturi (Erdianto Effendi: 2011: 99), menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana meliputi:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

## 2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur



kemampuan tidak bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian ( Pasal 362 KUHP ) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau ( Pasal 251 KUHP ) pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan

hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan ( Pasal 378 KUHP ), pemerasan ( Pasal 368 KUHP ), pengancaman ( Pasal 369 KUHP ) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP ) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.

Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Menurut Loebby Loqman (Erdianto Effendi: 2011: 99), terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: pertama,

tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama beserta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

## **B. Jenis-jenis Pembunuhan**

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan (Adami Chazawi, 2007: 56) antara lain:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339);
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
- f. Pengancuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345);
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349).

### C. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan

dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu.

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana

(batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa

dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain:

“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”



M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung: 2005: 31), mengutarakan

“direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* (murder) tetapi tidak mesti ada rencana.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK (Adami Chazawi: 2007: 85) menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “*Opzet*”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang,
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana)

memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan *moord* atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).

Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, karena kita adalah orang timur yang sangat menghormati orang tua.

Melawan orang tua saja sudah dipandang sebagai perbuatan durhaka, apalagi membunuh dengan sengaja.

Dalam KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam. Dikenal:

1. Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan Belanda berlaku aturan *concursus* atau gabungan tindak pidana dengan penambahan pidana dengan sepertiga.
2. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.
3. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhan melalui penculikan atau untuk menahan sandera.
4. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
5. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam.
6. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
7. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persekongkolan atau kelompok terorganisasikan.
8. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan, pemerasan atau secara bandit.
9. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat.
10. Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan lain

atau untuk memudahkan pelaksanaannya dan juga pembunuhan yang disertai dengan perkosaan atau tindakan seksual yang lain.

11. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah.
12. Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau jaringan tubuh.

Oleh karena semua gejala pembunuhan kejam seperti ini terjadi juga di Indonesia, seperti pembunuhan yang diikuti mutilasi, maka perlu difikirkan, bahwa pemberatan pidana delik pembunuhan dirinci juga dalam KUHP baru. Untuk sementara perlu hal semacam ini dijadikan pedoman pemidanaan delik pembunuhan sebagai “hal-hal yang memberatkan pidana” dalam pertimbangan hakim.

#### **D. Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Arti pidana dan pemidanaan**

Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel (Lamintang : 2010 : 33), arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat

belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.

Di atas telah dibahas sedikit mengenai pidana, sekarang akan dibahas mengenai arti dari pembedaan. Menurut Sudarto (Lamintang : 2010: 35), perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berkata:

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

## **2. Jenis –jenis pidana**

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Pidana kurungan,
- d. Pidana denda,
- e. Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

## **E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

### **1. Dasar Peniadaan Pidana**

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya.

Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada

kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat.

Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar peniadaan pidana ada dua macam, yaitu yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-undang. Adapun rincian dari pembedaannya adalah sebagai berikut :

a. Dasar Peniadaan Pidana dalam Undang-Undang

Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang terbagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, adapun pembagiannya:

- Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum diatur dalam Pasal 44 (tidak dapat dipertanggungjawabkan), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 (ayat (1) pembelaan terpaksa), Pasal 49 (ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas), Pasal 50 (menjalankan perintah jabatan yang sah), Pasal 51 (ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang), Pasal 51 (ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.
- Dasar peniadaan pidana dalam undang-undang yang bersifat khusus tercantum dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal



164 dan 165, Pasal 221 ayat (2)

b. Dasar Peniadaan Pidana di luar Undang-Undang

Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang terbagi dua juga yaitu:

- Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (secara materiil dalam fungsinya yang negatif)
- Dasar peniadaan pidana karena ketiadaan unsur kesalahan pada si pembuat.

**2. Dasar Pemberatan Pidana Umum**

a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

“bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
2. Memakai kekuasaan jabatannya;
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah

sepertiga adalah seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada pelanggaran dan kejahatan yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan menurut Schravendijk (Adami Chazawi: 2009: 74).

Jadi, pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu:

- Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang;
- Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

Tentang siapa atau dengan syarat-syarat apa yang dimaksud dengan pegawai negeri tidaklah dijelaskan lebih jauh dalam undang-undang. Pasal 92 KUHP tidaklah menerangkan tentang siapa pegawai negeri, tetapi sekedar menyebut tentang beberapa macamnya pegawai negeri, atau bolehlah dikatakan memperluas macamnya pegawai negeri, yaitu:

1. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
2. Orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
3. Semua anggota dewan subak (*waterschap*);
4. Semua kepala rakyat Indonesia asli; dan
5. Semua kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Dalam 2 (dua) undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian terdapat rumusan tentang pengertian pegawai negeri dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perluasan arti pegawai negeri yang lebih sempurna daripada Pasal 92 maupun pengertian menurut yurisprudensi.

Menurut UU No. 8 Tahun 1974, pegawai negeri adalah “mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan yang lebih sempurna dan lebih luas lagi adalah menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pada Pasal 1 butir ke-2 merumuskan sebagai berikut:

Pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negeri atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Walaupun kedua undang-undang di atas merumuskan mengenai pegawai negeri secara lebih sempurna, namun pengertian dan perluasan arti pegawai negeri menurut kedua UU tersebut di atas tidak berlaku terhadap Pasal 52. Perihal pegawai negeri ini hanya berlaku sebagaimana pengertian menurut praktik hukum (yurisprudensi) dan perluasan arti menurut Pasal 92 saja.

b. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana

Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a, yang bunyi lengkapnya adalah:

“bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan

kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan itu terwujud.

Oleh karena dalam Pasal 52a ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan maka di sini tidak berlaku pada pelanggaran. Di sini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (*Recidive*)

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (social), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat

pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

- Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3) KUHP.

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir-butir di atas, tidak dapat terjadi pengulangan.

Oleh karena tidak mengenal *general recidive* inilah, maka pengaturannya tidak dimuat dalam Buku Pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II dan pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun Buku III (pelanggaran).

#### d. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Dasar pemberatan pidana yang telah dibicarakan di atas adalah bersifat umum, artinya berlaku untuk segala macam tindak pidana. Disamping dasar pemberatan pidana umum tersebut, undang-undang menyebut juga beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa Pasal KUHP.

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

### **3. Dasar-dasar yang Menyebabkan diperingannya Pidana Umum**

#### a. Menurut KUHP: Belum Berumur 16 Tahun

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 67). Kini ini hanya penting dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak.

b. Menurut UU No. 11 Tahun 2012: Anak Yang Umurnya Telah Mencapai 12 (dua belas) Tahun Tetapi Belum Berumur 18 (delapan belas) Tahun Dan Belum Pernah Kawin.

Kini setelah Pasal 45, 46, dan 47 tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar diperingannya pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Menurut UU ini dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dasar peringanan pidana menurut UU No.11 Tahun 2012, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama mengenai: umurnya (telah 12 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita, selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang.

Sama dengan KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 ini juga terhadap anak (KUHP: belum berumur 16 Tahun, Undang-Undang ini telah berumur 12 tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu di antara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21).

c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan.

Bagaimana dengan percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 53 Ayat 2 dan 57 Ayat 1) pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari



ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (*pleger*: pelaku pelaksana).

d. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP.

Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu ada 2, yaitu:

1. Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar.
2. Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok) tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara Nomor 39/Pid.B/2013/PN.Mks. yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## **C. Jenis Penelitian**

### **1. Penelitian Pustaka**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

### **2. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan catatan dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan sesuatu yang nyata.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 39/PID.B/2013/PN.Mks)**

##### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa H. Abd. Majid Dg. Sikki pada hari rabu tanggal 07 November 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Puri Taman Sari V blok C 2 No. 10 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Saipul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah korban Saipul, kedatangan terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari korban Saipul yang dianggap oleh terdakwa telah menghamili anak terdakwa atas nama Ifa.

Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual daging, telah terlebih dahulu mempersiapkan suatu senjata tajam berupa sebilah pisau daging yang sering digunakannya sebagai alat potong daging sehari-hari, dimana

senjata tersebut oleh terdakwa diselipkannya dibalik bajunya atau setidaknya senjata tersebut dibawa oleh terdakwa sejak terdakwa berangkat dan rumahnya dan menuju ke rumah korban Saipul untuk meminta pertanggung jawaban korban atas hamilnya anak perempuan terdakwa yang bernama Ifa. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Saipul, pada pertemuan tersebut, saksi Akira Dewi Intan yang merupakan ibu kandung Saipul turut berada di rumah tersebut dan turut serta dalam pembicaraan antara terdakwa dan korban Saipul. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban Saipul dan saksi Akira Dewi Intan, bahwa anak perempuan terdakwa telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan oleh karena Ifa berpacaran dengan korban Saipul maka terdakwa menuntut pertanggung jawaban korban Saipul dengan cara menikahi anak terdakwa. Pada saat itu, saksi Akira Dewi Intan mengatakan kepada terdakwa jika benar anak terdakwa telah mengandung hasil hubungannya dengan korban Saipul, maka saksi Akira Dewi Intan berkeinginan untuk melihat dahulu kondisi anak terdakwa lalu membawanya ke dokter untuk dilakukan test DNA, dan jika dari hasil test DNA tersebut benar bahwa korban Saipul adalah ayah kandung dan bayi tersebut, maka korban Saipul akan menikahinya dan apabila bukan maka korban Saipul tidak akan menikahi anak terdakwa, pernyataan tersebut disampaikan oleh saksi Akira Dewi Intan kepada terdakwa oleh karena menurut korban Saipul bahwa pacar dan anak terdakwa bukan hanya korban Saipul, selain itu antara anak terdakwa dan Saipul sudah tidak

berpacaran lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan usia kehamilan anak terdakwa telah mencapai usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Tidak terima dengan perkataan tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung mencabut pisaunya dan mendatangi saksi Akira Dewi Intan, korban Saipul yang melihat hal tersebut berusaha menghalangi terdakwa hingga terjatuh dan pada posisi tersebut, terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya tersebut kearah dada Saipul sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban Saipul.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun bentuk dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban disusun secara subsidair sebagai berikut:

### **1. PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa H. Abd. Majid Dg. Sikki pada hari rabu tanggal 07 November 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Puri Taman Sari V blok C 2 No. 10 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban SAIPUL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah korban Saipul, kedatangan terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari korban Saipul yang dianggap oleh terdakwa telah menghamili anak terdakwa atas nama lfa.

Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual daging, telah terlebih dahulu

mempersiapkan suatu senjata tajam berupa sebilah pisau daging yang sering digunakannya sebagai alat potong daging sehari-hari, dimana senjata tersebut oleh terdakwa diselipkannya dibalik bajunya atau setidaknya senjata tersebut dibawa oleh terdakwa sejak terdakwa berangkat dan rumahnya dan menuju ke rumah korban Saipul untuk meminta pertanggung jawaban korban atas hamilnya anak perempuan terdakwa yang bernama Ifa. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Saipul, pada pertemuan tersebut, saksi Akira Dewi Intan yang merupakan ibu kandung Saipul turut berada di rumah tersebut dan turut serta dalam pembicaraan antara terdakwa dan korban Saipul. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban Saipul dan saksi Akira Dewi Intan, bahwa anak perempuan terdakwa telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan oleh karena Ifa berpacaran dengan korban Saipul maka terdakwa menuntut pertanggung jawaban korban Saipul dengan cara menikahi anak terdakwa. Pada saat itu, saksi Akira Dewi Intan mengatakan kepada terdakwa jika benar anak terdakwa telah mengandung hasil hubungannya dengan korban Saipul, maka saksi Akira Dewi Intan berkeinginan untuk melihat dahulu kondisi anak terdakwa lalu membawanya ke dokter untuk dilakukan test DNA, dan jika dari hasil test DNA tersebut benar bahwa korban Saipul adalah ayah kandung dan bayi tersebut, maka korban Saipul akan menikahnya dan apabila bukan maka korban Saipul tidak akan menikahi anak terdakwa, perkataan tersebut disampaikan oleh saksi Akira Dewi Intan kepada terdakwa oleh karena menurut korban Saipul bahwa pacar dan anak terdakwa bukan hanya korban Saipul, selain itu antara anak terdakwa dan Saipul sudah tidak berpacaran lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan usia kehamilan anak terdakwa telah mencapai usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Tidak terima dengan perkataan tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung mencabut pisaunya dan mendatangi saksi Akira Dewi Intan, korban Saipul yang melihat hal tersebut berusaha menghalangi terdakwa hingga terjatuh dan pada posisi tersebut, terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah dada Saipul sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban Saipul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Faisal Nomor : 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Irwan Hasan ditemukan beberapa kelainan yang disimpulkan sebagaimana berikut :

- Ditemukan Dua Buah luka tusuk di dada kiri, satu luka tusuk di lengan kiri atas, satu luka iris pada lengan kiri atas, dan tiga luka iris pada lengan kiri bawah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus organ hati, dan luka tersebut dapat menyebabkan peradangan menyeluruh pada rongga perut, akibat luka tersebut dapat membahayakan jiwa korban.

Bahwa korban Saipul akhirnya meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Kassi-Kassi

Nomor : 474.3/276/KS/X.II/2012 tanggal 14 Desember 2012. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.

## **2. SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa H. Abd. Majid Dg. Sikki, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di J1. Puri Taman Sari Vlok C 2 No. 10 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa Saipul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah korban Saipul, kedatangan terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari korban Saipul yang dianggap oleh terdakwa telah menghamili anak terdakwa atas nama lfa.

Bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual daging berencana setelah mendatangi rumah korban, terdakwa akan melanjutkan aktifitasnya pada hari itu ke rumah pemotongan hewan sehingga untuk tujuan tersebut, terdakwa membawa pisau pemotong daging yang sehari-harinya ia pergunakan tersebut lalu menyimpannya di pinggang atau setidaknya senjata tersebut dibawa oleh terdakwa sejak terdakwa berangkat dari rumahnya lalu menuju ke tempat jualan daging dan selanjutnya menuju ke rumah korban Saipul untuk meminta pertanggung jawaban korban atas hamilnya anak perempuan terdakwa yang bernama lfa. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Saipul, pada pertemuan tersebut, saksi Akira Dewi Intan yang merupakan ibu kandung Saipul turut berada di rumah tersebut dan turut serta dalam pembicaraan antara terdakwa dan korban Saipul. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban Saipul dan saksi terdakwa. Pada saat itu, saksi Akira Dewi Intan mengatakan kepada terdakwa jikalau benar anak terdakwa telah mengandung hasil hubungannya dengan korban Saipul, maka saksi Akira Dewi Intan berkeinginan untuk melihat dahulu kondisi anak terdakwa lalu membawanya ke dokter untuk dilakukan test DNA, dan jika dari hasil test DNA tersebut benar bahwa korban Saipul adalah ayah kandung dan bayi tersebut, maka korban Saipul akan menikahinya dan apabila bukan maka korban Saipul tidak akan menikahi anak terdakwa, perkataan tersebut di sampaikan oleh saksi Akira Dewi Intan kepada terdakwa oleh karena menurut korban Saipul bahwa pacar dan anak terdakwa bukan hanya korban Saipul, selain itu antara anak terdakwa dan Saipul sudah tidak berpacaran lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan usia kehamilan



anak terdakwa telah mencapai usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Tidak terima dengan perkataan tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung mencabut pisaunya dan mendatangi saksi Akira Dewi Intan, korban Saipul yang melihat hal tersebut berusaha menghalangi terdakwa hingga terjatuh dan pada posisi tersebut, terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya tersebut kearah dada Saipul sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dan satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban Saipul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Faisal Nomor : 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Irwan Hasan ditemukan beberapa kelainan yang disimpulkan sebagaimana berikut :

- Ditemukan Dua Buah luka tusuk di dada kiri, satu luka tusuk di lengan kiri atas, satu luka iris pada lengan kiri atas, dan tiga luka iris pada lengan kiri bawah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus organ hati, dan luka tersebut dapat menyebabkan peradangan.

Bahwa korban Saipul akhirnya meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Kassi-Kassi Nomor : 474.3/276/KS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

### **3. LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa H. Abd. Majid Dg. Sikki, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Puri Taman Sari Vlok C 2 No. 10 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melukai berat orang lain menjadikan kematian orang yaitu korban Saipul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah korban Saipul, kedatangan terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari korban Saipul yang dianggap oleh terdakwa telah menghamili anak terdakwa atas nama lfa.

Bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual daging berencana setelah mendatangi rumah korban, terdakwa akan melanjutkan aktifitasnya pada hari itu ke rumah pemotongan hewan sehingga untuk tujuan tersebut, terdakwa membawa pisau pemotong daging yang sehari-harinya ia pergunakan tersebut lalu menyimpannya di pinggang atau setidaknya senjata tersebut dibawa oleh terdakwa sejak terdakwa berangkat dari rumahnya lalu menuju ke tempat jualan

daging dan selanjutnya menuju ke rumah korban Saipul untuk meminta pertanggung jawaban korban atas hamilnya anak perempuan terdakwa yang bernama Ifa; Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Saipul, pada pertemuan tersebut, saksi Akira Dewi Intan yang merupakan ibu kandung Saipul turut berada di rumah tersebut dan turut serta dalam pembicaraan antara terdakwa dan korban Saipul. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban Saipul dan saksi Akira Dewi Intan, bahwa anak perempuan terdakwa telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan oleh karena Ifa berpacaran dengan korban Saipul maka terdakwa menuntut pertanggung jawaban korban Saipul dengan cara menikahi anak terdakwa. Pada saat itu, saksi Akira Dewi Intan mengatakan kepada terdakwa jikalau benar anak terdakwa telah mengandung hasil hubungannya dengan korban Saipul, maka saksi Akira Dewi Intan berkeinginan untuk melihat dahulu kondisi anak terdakwa lalu membawanya ke dokter untuk dilakukan test DNA, dan jika dari hasil test DNA tersebut benar bahwa korban Saipul adalah ayah kandung dari bayi tersebut, maka korban Saipul akan menikahnya dan apabila bukan maka korban Saipul tidak akan menikahi anak terdakwa, perkataan tersebut disampaikan oleh saksi Akira Dewi Intan kepada terdakwa oleh karena menurut korban Saipul bahwa pacar anak terdakwa bukan hanya korban Saipul, selain itu antara anak terdakwa dan Saipul sudah tidak berpacaran lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan usia kehamilan anak terdakwa telah mencapai usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Tidak terima dengan perkataan tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung mencabut pisaunya dan mendatangi saksi Akira Dewi Intan, korban Saipul yang melihat hal tersebut berusaha menghalangi terdakwa hingga terjatuh dan pada posisi tersebut, terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya tersebut kearah dada Saipul sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban Saipul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Faisal Nomor : 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Irwan Hasan ditemukan beberapa kelainan yang disimpulkan sebagaimana berikut :

- Ditemukan Dua Buah luka tusuk di dada kiri, satu luka tusuk di lengan kiri atas, satu luka iris pada lengan kiri atas, dan tiga luka iris pada lengan kiri bawah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus organ hati, dan luka tersebut dapat menyebabkan peradangan menyeluruh pada rongga perut, akibat luka tersebut dapat membahayakan jiwa korban. Bahwa korban Saipul akhirnya meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Kassi-Kassi Nomor : 474.3/276/KS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

#### **4. LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa H. Abd. Majid Dg. Sikki, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di J1. Puri Taman Sari Vlok C 2 No. 10 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu korban Saipul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah korban Saipul, kedatangan terdakwa di tempat tersebut bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban dari korban Saipul yang dianggap oleh terdakwa telah menghamili anak terdakwa atas nama lfa.

Bahwa terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual daging berencana setelah mendatangi rumah korban, terdakwa akan melanjutkan aktifitasnya pada hari itu ke rumah pemotongan hewan sehingga untuk tujuan tersebut, terdakwa membawa pisau pemotong daging yang sehari-harinya ia pergunakan tersebut lalu menyimpannya di pinggang atau setidaknya-tidaknya senjata tersebut dibawa oleh terdakwa sejak terdakwa berangkat dari rumahnya lalu menuju ke tempat jualan daging dan selanjutnya menuju ke rumah korban Saipul untuk meminta pertanggung jawaban korban atas hamilnya anak perempuan terdakwa yang bernama lfa; Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Saipul, pada pertemuan tersebut, saksi Akira Dewi Intan yang merupakan ibu kandung Saipul turut berada di d rumah tersebut dan turut serta dalam pembicaraan antara terdakwa dan korban Saipul. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada korban Saipul dan saksi Akira Dewi Intan, bahwa anak perempuan terdakwa telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan oleh karena lfa berpacaran dengan korban Saipul maka terdakwa menuntut pertanggung jawaban korban Saipul dengan cara menikahi anak terdakwa. Pada saat itu, saksi Akira Dewi Intan mengatakan kepada terdakwa jikalau benar anak terdakwa telah mengandung hasil hubungannya dengan korban Saipul, maka saksi Akira Dewi Intan berkeinginan untuk melihat dahulu kondisi anak terdakwa lalu membawanya ke dokter untuk dilakukan test DNA, dan jika dari hasil test DNA tersebut benar bahwa korban Saipul adalah ayah kandung dari bayi tersebut, maka korban Saipul akan menikahnya dan apabila bukan maka korban Saipul tidak akan menikahi anak terdakwa, perkataan tersebut di sampaikan oleh saksi Akira Dewi Intan kepada terdakwa oleh karena menurut korban Saipul bahwa pacar dan anak terdakwa bukan hanya korban Saipul, selain itu antara anak terdakwa dan Saipul sudah tidak berpacaran lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan usia kehamilan anak terdakwa telah mencapai usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Tidak terima dengan perkataan tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung mencabut

pisaunya dan mendatangi saksi Akira Dewi Intan, korban Saipul yang melihat hal tersebut berusaha menghalangi terdakwa hingga terjatuh dan pada posisi tersebut, terdakwa menikamkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah dada Saipul sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah korban Saipul.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Faisal Nomor : 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Irwan Hasan ditemukan beberapa kelainan yang disimpulkan sebagaimana berikut :

- Ditemukan Dua Buah luka tusuk di dada kiri, satu luka tusuk di lengan kiri atas, satu luka iris pada lengan kiri atas, dan tiga luka iris pada lengan kiri bawah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus organ hati, dan luka tersebut dapat menyebabkan peradangan menyeluruh pada rongga perut, akibat luka tersebut dapat membahayakan jiwa korban.

Bahwa korban Saipul akhirnya meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Kassi-Kassi Nomor : 474.3/276/KS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa H. ABD. MAJID DG. SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABD. MAJID DG. SIKKI dengan pidana penjara selama 17 (T’UJUH BELAS) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya
  2. 2 (dua) pasang sandal masing-masing
  3. 1 (satu) pasang sandal perempuan
  4. 2 (dua) lembar sarong
- d. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)

#### **4. Amar Putusan**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal-Pasal lain yang bersangkutan serta ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan hukum lain yang berlaku;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa H. ABD. MAJID DG.SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ABD. MAJID DG. SIKKI tersebut di atas dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Sepasang sandal perempuan dikembalikan kepada saksi Dg. Sunggu;
  - Dua lembar sarung dikembalikan kepada saksi Akira Dewi Intan; 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang merah;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 oleh kami, ANDI ASTARA, SH.sebagai Ketua Majelis Hakim, FRANGKI TAMBUWUN, SH.MH, dan PUJI HENDRO SUROSO, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh ALID BURHAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh GREAFIK LOSERTE T.K, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

## **5. Analisis Penulis**

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jaksa mengajukan barang bukti pembunuhan, keterangan saksi, dan alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum*.

Kemudian untuk membuktian tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau Pasal 340 KUHP sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan terlebih dahulu;
- d. Menghilangkan nyawa orang lain;

Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur tersebut :

- a. Barang siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan

bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “ dengan sengaja ” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari penikaman oleh terdakwa tersebut dilakukan karena terdakwa emosi.

Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua

ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.

Bahwa diatas telah terungkap bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa akibat merasa emosi karena anak perempuan terdakwa hamil tanpa adanya pertanggungjawaban dari korban.

Bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu terdakwa mengambil pisau yang tersimpan di pinggangnya, sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

d. Menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat, yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).



Bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan cara menusukkan pisau ke arah tubuh korban. Dari perbuatan terdakwa nyata menunjukkan adanya gerakan dari anggota tubuh terdakwa yaitu pada saat menggerakkan pisau ke arah korban Saipul, dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;

Bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban Saipul mengalami luka-luka sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Faisal Nomor : 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwan Hasan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Saiful mengalami beberapa luka tusukan dan penikaman yang diakibatkan adanya benturan dengan benda tajam, luka-luka tersebutlah yang membuat korban Saiful meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori syarat *condition sine qua non* atau teori khusus, dan lain-lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan

*causal verband* adalah arrest Hoog Militer Gerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Saipul, sehingga terhadap unsur ini Penulis berpendapat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Perkara Pidana Nomor 39/PID.B/2013/PN.Mks)**

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya tersebut, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya
2. 2 (dua) pasang sandal masing-masing
3. 1 (satu) pasang sandal perempuan
4. 2 (dua) lembar sarong

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah /janji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Akira Dewi Intan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penikaman yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 3.30 wita di rumah saksi J1. Puri Taman Sari Blok C2 No.10 Makassar; Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penikaman adalah terdakwa Abd. Majid Dg. Sikki (terdakwa) dan korbannya adalah anak saksi yang bernama Lk. Saiful umur 23 tahun;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya, tikaman pertama, korban kena pada lengan kiri dan bagian uluh hati sebelah kiri;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Hartelina dan sempat dioperasi, lalu saksi memindahkan ke Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pulang dari bekerja, dirumah saksi sudah ada terdakwa dan isterinya, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Siapa dan apa keperluannya" kemudian dijawab oleh terdakwa, "Bahwa saya adalah bapak dari Musdalifah yang hamil 7 bulan, mau minta pertanggung jawaban kepada Saiful anak saksi, karena Saiful yang menghamili Musdalifah";
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa, "Kalau memang anak terdakwa hamil, akan saksi periksakan ke dokter dan tes DNA dulu, kalau tes DNANYa sesuai dengan DNA anak saksi, maka akan dibicarakan baik-baik tetapi kalau DNANYa tidak sesuai dengan DNA anak saksi maka maaf solo", pada saat itulah terdakwa beraksi dan berdiri dihadapan saksi dengan membawa pisau, lalu korban Saiful langsung melindungi saksi dan pada saat itulah korban ditikaman pada bagian tangan 1(satu) kali dan perut bagian uluh hati sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa topi adalah milik terdakwa, sandal laki-laki juga milik terdakwa sedang sandal perempuan saksi tidak kenal;
- Bahwa barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan sepengetahuan saksi berbeda dengan yang dipakai untuk menikam korban;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi penikaman tidak ada pertengkaran antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan penikaman, terdakwa tidak berkata apa-apa lalu pergi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah;

2. Keterangan saksi Afriani Perdana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban Saiful;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan didepan Penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap adik saksi yaitu Lk. Saiful, saksi tidak mengetahuinya karena sedang di dapur, kemudian pada waktu saksi sedang di dapur tersebut saksi mendengar ibu saksi minta tolong kemudian saksi ke ruang tamu dan melihat adik saksi sedang tergeletak lalu saksi keluar minta tolong;
- Bahwa kejadiannya penikaman tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 03.30 wita di rumah saksi J1. Puri Taman Sari Blok C2 No.10 Makassar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa datang bertamu ke rumah saksi, yang menerima pertama dan membukakan pintu rumah adalah saksi, Lk. Saiful sedang tidur didalam kamar, lalu saksi bangunkan, pada waktu itu terdakwa sempat ngomong kalau anaknya sedang hamil 7 bulan dan minta Lk. Saiful untuk bertanggungjawab atas perbuatan-nya, tidak lama kemudian ibu saksi datang lalu menemui terdakwa di ruang tamu tetapi saksi tidak mendengar apa pembicaraan ibu saksi dan terdakwa;
- Bahwa reaksi korban Lk. Saiful pada saat terdakwa menyatakan anaknya telah hamil selama 7(tujuh) bulan hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak terdakwa yang bernama lfa pernah pacaran dengan adik saksi Lk.Saiful selama 1(satu) tahun dan setahun saksi mereka putus pada tanggal 07 Oktober 2011, hal itu saksi ketahui karena saksi melihat surat milik lfa;
- Bahwa seingat saksi Pr. lfa pernah berkunjung ke rumah saksi yaitu terakhir pada tahun 2011;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah karena luka pada lengan dan perut bagian uluh hati dan meninggal dunia di rumah sakit Faisal;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Keterangan saksi Nusul menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Satpam/Security di Komplek Perumahan Taman Sari;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal lupa tahun 2012 sekitar jam 3.30 wita, di J1. Puri Taman Sari Blok C2 No.10 Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tugas piket, dari pagi sampai malam yaitu mulai jam 08.00 s/d 08.00 malam dan sesuai jadwal tiap piket yang bertugas 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya kejadian karena mendengar orang teriak minta tolong selain itu juga atas informasi dari warga kemudian saksi menolong korban ;

- Bahwa saksi mengenal korban sebagai warga perumahan dan saksi mengetahui jika korban akhirnya meninggal dunia pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat datang di Kompleks perumahan, saksi hanya melihat terdakwa dipos pada saat terdakwa akan keluar dari Kompleks perumahan dengan mengendarai sepeda motor dan pakaiannya berlumuran darah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa sesuatu pada saat keluar dari kompleks;
- Bahwa saksi juga tidak bertanya kepada terdakwa pada saat bertemu dipos jaga, terdakwa keluar hanya sendirian dan terlihat tergesa-gesa dan saat itu portal jaga tidak tertutup;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Keterangan Saksi Dg. Sunggu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah isteri sah dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan didepan penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan pernah datang ke rumah korban Saiful bersama suami saksi (terdakwa) pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 15.30 Wita di J1. Puri Taman Sari Blok C2 Nomor 10 Makassar;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hendak pergi ke pemotongan sapi di Jl. Hertasning tetapi mampir dulu ke rumah korban Saiful untuk menanyakan dan minta pertanggung jawaban korban atas kehamilan anak saksi;
- Bahwa sampai di rumah korban, yang membukakan pintu dan mempersilahkan masuk kakak korban, Saiful sedang tidur kemudian terjadilah pembicaraan
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan ibu korban diantaranya terdakwa menanyakan kepada ibu korban "bagaimana dengan *anak* saya yang sudah hamil, kalau masalah uang bisa dibicarakan yang penting anak saya dinikahi", tetapi ibu korban marah-marah, juga menunjuk-nunjuk kepada saksi dan mengusir saksi keluar dari rumah, lalu saksi pulang sendiri naik bentor, sedang terdakwa masih di rumah korban;
- Bahwa pada saat terdakwa menanyakan kepada ibu korban, Saiful hanya terdiam saja, sedangkan ibu korban mengamuk tidak mau, dan menyatakan' "saya tidak mau karena anak saya tidak dengan anak terdakwa";
- Bahwa ibu korban menyatakan akan melakukan tes DNA dulu terhadap kehamilan anak saksi, akan tetapi saksi tidak tahu apa itu "DNA", karena baru kali ini saksi mendengar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu terdakwa menikam korban Saiful, karena saksi sudah keluar rumah dan terus pulang;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pada waktu ke rumah korban terdakwa membawa pisau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap Saiful pada hari itu juga karena diberitahukan oleh terdakwa pada saat terdakwa sudah sampai di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lk. Saiful (korban) meninggal dunia karena ditikam oleh terdakwa (suami saksi) pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 20 tahun yang lalu dan dari hasil perkawinan saksi dengan terdakwa dikaruniai 14(empat belas) orang anak yaitu 7(tujuh) laki-laki dan 7(tujuh) perempuan;
- Bahwa seingat saksi terdakwa bekerja sebagai pemotong hewan sudah 20 tahun adapun tempat pemotongan dagingnya di jalan Hertasning;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sandal perempuan adalah milik saksi, sandal laki-laki dan topi adalah milik terdakwa, sedang barang bukti pisau saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Keterangan saksi Musdalifah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa ayah kandung saksi dan kenal juga dengan korban karena korban adalah pacar saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan didepan Penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP perkara ini;
- Bahwa saksi pacaran dengan Lk. Saiful sejak bulan Mei 2011 berawal di Lokasi KKN dan selama pacaran saksi pernah bertengkar dengan Lk. Saiful sekitar bulan Oktober 2011 karena persoalan biasa antara orang pacaran tetapi akibatnya hubungan saksi dengan korban sempat putus tetapi kemudian sambung lagi pada bulan Maret 2012;
- Bahwa saksi pacaran hanya dengan Saiful, saksi tidak pernah berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Lk. Saiful sering datang kerumah saksi kadang 3(tiga) kali seminggu setelah habis mengantar ibunya ke sekolah sekitar jam 09.00 -10.00 wita, tidak lama di rumah saksi kemudian pamit pulang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Lk. Saiful datang, ibu/bapak saksi tidak ada di rumah yang ada hanya adik-adik saksi;
- Bahwa saksi juga sering kerumah Lk. Saiful pada tahun 2011, pada saat ibu korban (Saiful) tidak ada di rumah, sekitar jam 09.00-10.30

wita, saksi hanya sebentar saja di rumah saiful karena takut kalau ibu Saiful pulang;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu dan adik Saiful dan saksi biasa ngobrol dengan Saiful bahkan kemudian saksi hamil dan melahirkan anak pada tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kehamilan saksi ke Lk. Saiful dan dijawab oleh Lk. Saiful "beri kesempatan untuk bicara kepada ibu saya";
- Bahwa saksi pergi ke Mamuju karena takut dengan keluarga, bukan karena dltolak oleh Lk. Saiful;
- Bahwa usia kehamilan saksi pada saat berangkat ke Mamuju adalah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kehamilan saksi kepada ibu saksi sebelum berangkat ke Mamuju tanggal 1 Juli 2012 tetapi saksi tidak pernah memberitahukan kehamilan saksi kepada Bapak saksi (terdakwa) karena takut dibunuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Bapak/Ibu saksi pergi kerumah Lk. Saiful karena saksi sudah pergi ke Mamuju;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan alamat Lk. Saiful kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Lk. Saiful meninggal dunia 1(satu) minggu setelah kejadian, informasi diterima dari teman KKN saksi yaitu Lk. Irfan yang mengirim pesan singkat "kalau Saiful sudah meninggal karena dibunuh oleh bapak saksi";
- Bahwa selama saksi pergi ke Mamuju tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa dan baru dipersidangan ini saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Keterangan saksi Andi Andini menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah disampaikan di depan Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat ada orang berteriak minta tolong dari arah luar karena mendengar teriakan minta tolong lalu saksi lari keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang berteriak minta tolong karena saksi baru 4(empat) bulan tinggal di komplek tersebut;
- Bahwa yang berteriak minta tolong tersebut adalah perempuan yang masih muda;
- Bahwa setelah saksi keluar rumah saksi bertanya kepada orang yang berteriak minta tolong "ada apa ? dijawab "adik saya ditusuk orang yang sedang pergi dari rumah pakai motor";
- Bahwa saksi mengenal motor yang dipakai orang tersebut adalah motor metik, akan tetapi saksi tidak melihat wajah orang tersebut karena saksi hanya melihatnya dari belakang;

- Bahwa saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat korban tergeletak dilantai masih hidup dan mengerang kesakitan diatas pangkuan ibunya, saksi juga melihat luka korban pada bagian tangan dan perut korban sebelah kiri, selanjutnya saksi keluar minta tolong cari taxi;
- Bahwa selain ibu korban sudah banyak tetangga rumah yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah korban berdekatan, hanya terpaut satu rumah solo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi yang menguntungkan) yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

- Keterangan Saksi Alexander Kovanso menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah lima tahun lamanya karena bertetangga dekat bahkan jaraknya hanya sekitar 2 meter, daging sapi dan kerbau di Pasar Pa'baeng-Baeng Makassar, kalau berangkat ke pasar subuh-subuh akan tetapi jam berapa terdakwa pulang dari jualan daging, saksi tidak tahu dan saksi juga sering berpapasan dengan terdakwa karena setiap pagi saksi juga berangkat ke pasar untuk membeli dagangan kemudian sekitar jam 09.00 saksi sudah sampai rumah untuk berjualan di rumah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa sesuatu barang pada saat berangkat atau pulang dari jualan daging;
  - Bahwa Pasar Pa'baeng-Baeng biasanya tutup jam 07.00 malam;
  - Bahwa saksi tidak melihat adanya kejadian pembunuhan tetapi pada saat sedang istirahat di rumah, saksi mendengar orang bercerita kalau terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap laki-laki bernama Saiful, tetapi saksi tidak tahu dimana tempat kejadiannya;
  - Bahwa 3 hari kemudian setelah kejadian pembunuhan saksi membaca Koran yang menyebutkan nama korban yang meninggal karena pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah Saiful yaitu pacar Musdalifah anak kandung terdakwa sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau korban Saiful berpacaran dengan anak terdakwa oleh karena korban sering datang ke rumah terdakwa pada pagi hari sekitar jam 09.00 dan yang ada di rumah hanya Musdalifah dan adik-adiknya;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada waktu korban ke rumah terdakwa/Musdalifah sekitar satu bulan sebelum meninggal dunia dan pada waktu itu banyak orang yang melihat karena motor korban sempat rusak;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 Nopember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Mappincara, Sp.B.-KBD, dokter Iwan Dani, Sp.B, dan dokter Irwan Hasan serta mengetahui Konsulen Forensik dan Medikolegal dokter Jerry Dase SH.,SpF. MKes. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan Dua Buah luka tusuk di dada kiri, satu luka tusuk di lengan kiri atas, satu luka iris pada lengan kiri atas, dan tiga luka iris pada lengan kiri bawah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus organ hati, dan luka tersebut dapat menyebabkan peradangan menyeluruh pada rongga perut, akibat luka tersebut dapat membahayakan jiwa korban.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini juga dilampirkan Surat Kematian dari kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Nomor : 474.3/276/ KS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Soeful Tri Ramadhan, SE.

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah disampaikan di depan Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP perkara ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah melakukan penusukan dengan pisau terhadap korban Saiful, yang dilakukan berapa kali terdakwa tidak ingat;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 15.30 Wita di rumah korban di Jl. Puri Taman Sari Blok C2 Nomor 10 Makassar;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah korban bersama isteri terdakwa, dengan maksud untuk minta pertanggung jawaban kepada korban atas kehamilannya anak terdakwa yaitu saksi Musdalifah;
- Bahwa di rumah korban Terdakwa dengan isterinya ditemui oleh korban dan ibu kandung korban tetapi pada saat terdakwa dengan isterinya datang, yang mebukakan pintu kakak korban karena korban masih tidur sedangkan ibu korban baru pulang dari kerja setelah terdakwa berada di rumah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena pada saat terdakwa meminta pertanggung jawaban atas kehamilan anak terdakwa, korban diam saja sedangkan ibu korban keberatan sebelum dilakukan tes kehamilan dulu dan tes DNA;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap korban terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menaiki sepeda motornya dan meninggalkan korban di tempat kejadian perkara, sampai di rumah, terdakwa menyampaikan kepada isterinya kalau habis menusuk korban dengan pisau setelah itu kemudian terdakwa melaporkan kejadian penusukan tersebut kepada kepolisian;

- Bahwa pisau yang dipakai menusuk korban dibawa terdakwa dari tempat jualan daging yang diselipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa atas kejadian penusukan tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa pisau, topi, sepasang sandal laki-laki dan sepasang sandal perempuan, semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya Visum et Repertum atas nama korban Saiful serta diperkuat adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang merupakan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 3.30 wita bertempat di rumah saksi Dra. Akira Dewi Intan J1. Puri Taman Sari Blok C2 No.10 Makassar telah terjadi penikaman dengan menggunakan pisau yang dilakukan terdakwa terhadap korban Saiful yaitu anak saksi Dra Akira Dewi Intan;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi Akira Dewi Intan bersama dengan isterinya yaitu saksi Dg. Sunggu dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa benar saksi Musdalifa berpacaran dengan korban Saiful sejak bulan Mei 2011 berawal ketemu di Lokasi KKN dan selama saksi Musdalifa pacaran dengan korban Saiful pernah putus karena pertengkaran biasa orang pacaran sekitar bulan Oktober 2011 tetapi kemudian bersambung pacaran lagi pada bulan Maret 2012;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menanyakan kepada korban Saiful untuk meminta pertanggung-jawaban atas kehamilan saksi Musdalifa (anak terdakwa) terdakwa hanya diam saja tidak menjawab sedangkan ibu korban merasa keberatan dan meminta untuk diperiksakan kehamilannya ke dokter dan dilakukan tes DNA dulu, apabila basil tes DNA sesuai dengan DNA korban barulah dibicarakan lebih lanjut, atas hal itulah kemudian terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri untuk menikam korban hingga beberapa kali;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan terdakwa tersebut korban Saiful mengalami luka-luka, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Hartelina dan sempat dioperasi, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tetapi jiwanya tidak tertolong dan akhirnya korban meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 Nopember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Mappincara, Sp.B.-KBD, dokter Iwan

Dani, Sp.B, dan dokter Irwan Hasan serta mengetahui Konsulen Forensik dan Medikolegal dokter Jemy Dase SH.,SpF. MKes.dari Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dan Surat Kematian dan kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Nomor : 474.3/276/KS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa aspek hukum dipersalahkan dan dihukum atas kesalahannya, berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2)

KUHP; LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja, dan direncanakan lebih dahulu, merampas nyawa orang lain;

#### 1. Barang Siapa,

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa secara yuridis formal adalah mengacu kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah terdakwa yang bernama H. ABD. MAJID DG. SIKKI yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri pada saat ditanyakan identitasnya diawal persidangan perkara ini maupun dan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan baik, yaitu dapat menjawab secara jelas, terang dan terperinci setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu

terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu Barang Siapa ini telah terbukti ;

2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa, dalam menganalisa unsur dengan sengaja, maka yang perlu diperhatikan adalah unsur ini sangat berkaitan erat dengan subjektifitas si pelaku kejahatan tersebut, hal ini terkandung dalam niat batin dan hati sanubari si pelaku, dan apabila niat tersebut dapat diwujudkan secara nyata barulah unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa, menurut Memori Penjelasan ( Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau melakukan suatu perbuatan, dan pelaku juga menyadari sepenuhnya akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, dengan ketentuan akibat yang akan timbul ataupun terjadi itu adalah merupakan tujuan yang diinginkan oleh si pelaku, dalam hal ini tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tahu atau tidak, akibat hukum yang akan timbul atas perbuatannya yang diinginkannya tersebut,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa pelaku ( subyek hukum ) sebelum mewujudkan dan atau melaksanakan niat atau kehendaknya untuk melakukan perbuatan pidana, telah menyusun secara matang langkah langkah yang akan ditempuh guna mewujudkan keinginannya tersebut, dalam hal ini pelaku telah memperhitungkan dan mempertimbangkan segala resiko atau baik buruknya perbuatan yang akan dilakukannya. Pelaku secara matang, telah memikirkan dengan tenang, waktu, tempat, cara, serta alat yang akan digunakannya, dan pelaku juga telah memikirkan akibat perbuatannya sekaligus cara-cara lain agar orang lain sulit mengetahui bahwa dialah pelakunya;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hose Raad 22 Maret 1909 , untuk dapat diterimanya suatu " rencana terlebih dahulu ", maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu singkat atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan arti dan akibat-akibat dari perbuatannya, dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali mengenai rencananya itu. Antara timbulnya maksud untuk melakukan kejahatan masih memiliki tenggang waktu dengan pelaksanaan perbuatan, dan dalam tenggang waktu ini pelaku masih punya kesempatan yang cukup untuk meneruskan atau menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka hukum di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa H. Abd. Majid Dg. Sikki dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi unsur tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa terdakwa adalah penjual daging di Pasar Pa'baeng-Baeng, berangkat pagi-pagi masih subuh dan pulang malam hari, berangkat dan pulang terdakwa tidak pernah membawa peralatan berupa pisau sebagai alat untuk pemotong daging, oleh karena pisau yang dipakai untuk memotong daging tersebut selalu ditinggal di Pasar Pa'baeng-Baeng;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang tua sudah pasti terpukul dan sangat kecewa mengetahui anak perempuan yang dicintainya dan anak satu-satunya dari 14 orang bersaudara yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu saksi Musdalifah, telah hamil 7 bulan sebelum menikah, sehingga sudah seharusnya sebagai seorang bapak berusaha mencari orang yang menghamilinya untuk dimintai pertanggung-jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat kehamilannya tersebut kemudian saksi Musdalifah meninggalkan rumah pergi ke Mamuju untuk menghindari dari keluarganya karena takut terutama dengan terdakwa sebagai ayah kandungnya, hingga melahirkan anak pada tanggal 02 Desember 2012 yang kemudian anak yang dilahirkan saksi Musdalifah tersebut diambil anak angkat oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena kehamilan anak terdakwa tersebut maka pada Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa bersama dengan isterinya yaitu saksi Dg. Sunggu telah mendatangi rumah korban Saiful, yang menurut keterangan saksi Musdalifah, korban Saiful adalah pacarnya dan saksi Musdalifah hamil karena telah beberapa kali berhubungan badan dengan korban Saiful.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan terdakwa datang ke rumah korban Saiful untuk meminta pertanggung-jawaban kehamilan anak terdakwa dengan membawa sebuah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya tanpa sepengetahuan saksi Dg. Sunggu isterinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tentu saja dapat memperkirakan adanya beberapa kemungkinan yang terjadi dalam membicarakan penyelesaian masalah kehamilan anak terdakwa, dapat saja penyelesaiannya berjalan mulus dan itu yang diharapkan oleh terdakwa akan tetapi bukan tidak mungkin justru yang terjadi sebaliknya, tidak berjalan lancar bahkan dapat saja terjadi penolakan dari korban Saiful dan atau keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai wujud nyata dari perasaan emosinya oleh karena ternyata korban Saiful tidak memberi ketegasan untuk kesediannya bertanggung jawab terhadap kehamilan anak gadis terdakwa Musdalifah dan bahkan ibu korban yaitu saksi Akira Dewi Intan menolak untuk menikahkan korban Saiful dengan anak terdakwa sebelum dipastikan tentang kehamilan saksi Musdalifah yaitu dengan melakukan pemeriksaan kehamilan pada dokter dan tes DNA terlebih dahulu untuk mengetahui dan memastikan anak yang dikandung saksi Musdalifah tersebut basil hubungan badan dengan korban Saiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk mewujudkan rasa emosi dan kekesalannya oleh karena ternyata penyelesaian kehamilan anak terdakwa tidak seperti yang diharapkan dan kemungkinan keadaan seperti ini sudah pasti ada dalam perkiraan terdakwa sebelumnya maka kemudian terdakwa mengambil pisau yang sudah disiapkan sebelumnya yang diselipkan dipinggang kirinya untuk menikam korban beberapa kali secara membabi buta, terbukti luka tusuk yang diderita korban adalah dua buah

Menimbang, bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan terdakwa tersebut korban Saiful mengalami luka-luka, kemudian korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Hartelina untuk dioperasi, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tetapi tidak tertolong jiwanya dan akhirnya korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor: 076/RSIF/XII/2012 tanggal 12 Nopember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Mappincara, Sp.B.KBD, dokter Iwan Dani, Sp.B, dan dokter Irwan Hasan serta mengetahui Konsulen Forensik dan Medikolegal dokter Jemy Dase SH.,SpF. MKes.dari Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dan Surat Kematian dari kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Nomor : 474.3/276/KS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, sikap batin terdakwa telah diwujutkan dalam perbuatannya yaitu karena kedatangan terdakwa di rumah korban ternyata tidak seperti yang diharapkan dalam pengertian korban Saiful tidak mau bertanggung-jawab untuk menikahi anak terdakwa (saksi Musdalifah), maka pisau yang telah disiapkan terdakwa yang diselipkan dipinggang terdakwa sebelah kiri, benar-benar kemudian dipergunakan untuk menikam korban Saiful beberapa kali yang mengakibatkan kematian korban sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum di atas;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mewujudkan sikap batinnya tersebut, sebenarnya terdakwa masih cukup waktu untuk berfikir dengan tenang apakah akan membatalkan niatnya tersebut ataukah melanjutkan niatnya, akan tetapi faktanya seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka-luka yang dialami korban Saiful diantaranya luka tusuk di dada kiri bawah menembus organ hati,

yang merupakan organ tubuh yang sangat vital, maka kematian korban Saiful adalah memang dikendaki oleh terdakwa, setidaknya terdakwa dapat menginsafi.

Menimbang, bahwa selain itu apabila kematian korban tidak dikehendaki oleh terdakwa tetapi hanya disebabkan emosi sesaat setelah mendengar jawaban dari korban Saiful maupun ibu korban tidak seperti yang diharapkan, seharusnya setelah menikam korban, terdakwa tidak langsung pergi begitu saja meninggalkan korban tanpa berusaha untuk membantu atau setidaknya meminta pertolongan orang lain untuk membantu korban, sehingga nyawa korban masih ada kemungkinan dapat diselamatkan;

Menimbang, bahwa bahkan untuk membicarakan sesuatu yang penting dan sakral yaitu tentang pernikahan anak terdakwa, seharusnya terdakwa meluangkan waktu yang khusus dengan mencari hari yang baik dan juga tanpa harus membawa sebuah pisau yang sama sekali tidak ada hubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai keyakinan perbuatan yang dilakukan terdakwa telah direncanakan sebelumnya, oleh karena itu maka unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara terdakwa ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terdakwa atas perbuatannya, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal. Berkembang dalam masyarakat, dan harus memperhatikan asas keseimbangan antara pelaku kejahatan dengan korban yang timbul dalam kejahatan tersebut, baik secara individu maupun secara sosial, karena penegakan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana secara panjang lebar diuraikan dalam Nota Pembelaannya tetapi sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengena

status penahanan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yang berupa satu bilah pisau beserta sarungnya telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa sepasang sandal laki-laki, sepasang sandal perempuan dan satu penutup kepala karena tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini maka barang bukti yang berupa sepasang sandal laki-laki dan penutup kepala dikembalikan kepada terdakwa, sepasang sandal perempuan dikembalikan kepada saksi Dg. Sunggu sedangkan dua lembar sarung juga tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa maka barang bukti sarung tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Akira Dewi Intan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam tidak saja bagi keluarga korban tetapi juga bagi anak terdakwa sendiri yaitu saksi Musdalifah pacar korban;
- Tidak adanya perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

#### **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

## **2. Amar Putusan**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;



Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal-Pasal lain yang bersangkutan serta ketentuan dalam KUHPA maupun ketentuan hukum lain yang berlaku;

Mengadili:

6. Menyatakan terdakwa H. ABD. MAJID DG.SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA";
7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ABD. MAJID DG. SIKKI tersebut di atas dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun;
8. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
10. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Sepasang sandal perempuan dikembalikan kepada saksi Dg. Sunggu;
  - Dua lembar sarung dikembalikan kepada saksi Akira Dewi Intan; 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang merah;
7. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 oleh kami, ANDI ASTARA, SH.sebagai Ketua Majelis Hakim, FRANGKI TAMBUWUN, SH.MH, dan PUJI HENDRO SUROSO, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh ALID BURHAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh

GREAFIK LOSERTE T.K, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

### **3. Analisis Penulis**

Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No. 39/PID.B/2013/PN.Makassar, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim

adalah keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum*, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain, membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa telah mengakui kesalahannya, terdakwa sopan di persidangan dan terakhir terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, Penulis tidak sependapat dengan *vonis* Majelis Hakim yang memberikan

hukuman penjara kepada terdakwa selama 17 tahun. Benar Putusan itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara 17 tahun kepada terdakwa. Akan tetapi ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dimana hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa. Kemudian Hakim seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang masih melekat erat dengan budaya masyarakat Sulawesi Selatan yakni budaya *siri'*. Sehingga vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya bisa lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam budaya masyarakat Bugis kasus yang penulis kaji merupakan malu yang sangat besar (*Siri'*) bagi keluarga perempuan. Dimana anak perempuan terdakwa hamil tanpa adanya pertanggungjawaban dari korban untuk segera menikahinya. *Siri'* adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, rasa dendam (dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pemulihan harga diri yang dipermalukan). Dalam budaya masyarakat Bugis apabila dipermalukan (*Nipakasiri'*) maka mereka lebih senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan *Siri'*nya dari pada hidup dengan menanggung malu ataupun hidup tanpa *Siri'*.

Budaya atau adat *Siri'* di Sulawesi Selatan telah ada jauh sebelum KUHP berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk melihat nilai yang hidup dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) juga menyatakan :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam hal ini masih terdapat kelemahan hakim, yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim kurang mengkaji nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 39/PID.B/2013/PN.Makassar adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 4 (empat) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP, Lebih-lebih Subsidair Lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 39/PID.B/2013/PN.Makassar menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan tiga alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam

melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Tentang hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam tidak saja bagi keluarga korban tetapi juga bagi anak terdakwa sendiri yaitu saksi Musdalifah pacar korban dan tidak adanya perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa.

Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa telah mengakui kesalahannya, terdakwa sopan di persidangan dan terakhir terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

## **B. Saran**

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah

ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

\_\_\_\_\_. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

\_\_\_\_\_. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

\_\_\_\_\_. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada

Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone

Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana & Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Erdianto Effendi . 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama

Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika

Solahuddin. 2008. *KUHP, KUHP dan KUHPdt*. Jakarta: Visimedia

Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

### Peraturan Perundang-undangan

UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
MAKASSAR 90111

Makassar, 22 Desember 2014

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 1539 /HKM/XII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**RAMLI DJALIL, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FEBRIANSYAH  
No.Pokok : B111 09 853  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Borong Raya No. 104 Makassar.  
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 39/ PID.B/2013/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014, dan telah dibimbing oleh :

1. ANDI ASTARA, SH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 02 Desember 2014 dengan Nomor : 8500 /UN4.6.3/PL.02/2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS,   
  
**RAMLI DJALIL, SH.MH**  
NIP.1962123119910310045